



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURHALIS M. LAUSELANG**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **231048**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m²/91 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 411 m²/117 m² di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 5200 m²/250 m² di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
4. Tanah Seluas 6000 m² di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 45000 m² di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
7. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
9. Tanah Seluas 10000 m² di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 17.000.000**

1. LAINNYA, --- --- Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 15.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.649.207
F. HARTA LAINNYA	Rp.	70.000.000
Sub Total	Rp.	4.063.649.207
III. HUTANG	Rp.	25.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.038.649.207

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.